

Sejarah Kebijakan Moneter di Dunia Islam: Periode Umawiyah hingga Turki Utsmani

Gugun Sodik, Yadi Janwari, Sofian Al-Hakim

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: gugun@ars.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas perkembangan kebijakan moneter di dunia Islam, mulai dari masa Dinasti Umawiyah hingga Kekaisaran Turki Utsmani. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis evolusi kebijakan moneter, mencakup pencetakan dan standarisasi mata uang, pengelolaan pajak, serta sistem fiskal di berbagai kerajaan Islam yang memerintah antara abad ke-7 hingga awal abad ke-20. Pada masa Dinasti Umawiyah, dimulai standarisasi dinar dan dirham yang memainkan peran kunci dalam perdagangan internasional. Kebijakan pajak, seperti jizyah dan kharaj, juga memperkuat stabilitas fiskal pemerintahan. Pada masa Dinasti Abbasiyah, sistem perbankan dan administrasi keuangan mengalami perkembangan signifikan, termasuk munculnya lembaga Baitul Mal dan penggunaan sistem *iqta'*. Sementara itu, Dinasti Umawiyah di Spanyol menciptakan dinar emas yang menopang perekonomian Al-Andalus dan menghubungkannya dengan dunia Mediterania. Kerajaan-kerajaan kecil, seperti Fatimiyah, Mamluk, Safawiyah di Persia, dan Mughal di India, masing-masing menghadirkan inovasi dalam kebijakan moneter dan perdagangan, terutama terkait penggunaan emas dan perak serta kebijakan fiskal untuk mendukung stabilitas ekonomi. Kekaisaran Turki Utsmani, sebagai kekuatan besar terakhir di dunia Islam, menghadapi tantangan besar dari krisis ekonomi internal dan pengaruh kekuatan kolonial Eropa. Reformasi moneter dan fiskal menjadi kunci dalam upaya bertahan Utsmani, meskipun pada akhirnya tidak cukup untuk mencegah keruntuhan kekaisaran. Artikel ini menyimpulkan bahwa kebijakan moneter di dunia Islam secara historis dipengaruhi oleh faktor internal, seperti stabilitas politik dan perkembangan ekonomi, serta faktor eksternal, seperti hubungan perdagangan internasional dan ancaman kolonialisme.

Kata kunci: Kebijakan moneter, Dinasti Umawiyah, Dinasti Abbasiyah, Kekaisaran Utsmani, Perdagangan Islam, Pajak, Mata uang

ABSTRACT

*This thesis explores the development of monetary policy in the Islamic world, from the Umayyad Dynasty to the Ottoman Empire. The research aims to analyze the evolution of monetary policies, including the minting and standardization of currency, tax administration, and fiscal systems across various Islamic empires that ruled between the 7th and early 20th centuries. During the Umayyad period, the standardization of dinar and dirham coins played a crucial role in international trade. Tax policies, such as jizyah and kharaj, strengthened the fiscal stability of the state. In the Abbasid era, banking and financial administration saw significant growth, with the establishment of institutions like the Baitul Mal and the implementation of the *iqta'* system. The Umayyad Caliphate in Spain minted gold dinars, supporting the economy of Al-Andalus and connecting it to the Mediterranean trade networks. Smaller kingdoms, including the Fatimid, Mamluk, Safavid Persia, and Mughal India, each introduced innovations in monetary policy and trade, particularly in the use of gold and silver, as well as fiscal policies to maintain economic stability. The Ottoman Empire, as the last great Islamic power, faced significant challenges from internal economic crises and the influence of European colonial powers. Monetary and fiscal reforms were key in the Ottoman efforts to survive, though ultimately insufficient to prevent the empire's collapse. The research concludes that monetary policy in the Islamic world was historically influenced by internal factors, such as political stability and economic development, and external factors, including international trade relations and colonial threats.*

Keywords: Monetary policy, Umayyad Dynasty, Abbasid Dynasty, Ottoman Empire, Islamic trade, taxation, currency

PENDAHULUAN

Kebijakan moneter telah memainkan peran penting dalam perkembangan ekonomi dan stabilitas politik di dunia Islam sepanjang sejarah. Sebagai pusat perdagangan internasional yang strategis, kerajaan-kerajaan Islam dari masa Umawiyah hingga Turki Utsmani mengembangkan sistem ekonomi dan moneter yang tidak hanya mengatur stabilitas internal tetapi juga membentuk hubungan dengan dunia luar. Melalui pengelolaan mata uang, perpajakan, dan perdagangan internasional, dunia Islam mampu menjadi kekuatan ekonomi besar pada masanya.

Pada masa Dinasti Umawiyah, pencetakan dan standarisasi mata uang seperti dinar dan dirham menciptakan landasan kuat bagi perdagangan lintas batas. Kebijakan pajak seperti *jizyah* dan *kharaj* juga berperan penting dalam mengamankan pemasukan negara. Dinasti Abbasiyah kemudian melanjutkan perkembangan tersebut dengan memperkenalkan sistem fiskal yang lebih terorganisir, serta memanfaatkan lembaga perbankan seperti *Baitul Mal*.¹

Di belahan lain, Dinasti Umawiyah di Spanyol menciptakan kebijakan moneter dan fiskal yang memungkinkan Al-Andalus menjadi pusat ekonomi di kawasan Mediterania. Kerajaan-kerajaan kecil seperti Fatimiyah, Mamluk, Safawiyah di Persia, dan Kesultanan Mughal di India, masing-masing mengembangkan sistem moneter yang disesuaikan dengan kondisi lokal serta pengaruh perdagangan global.²

Turki Utsmani, sebagai salah satu kekuatan besar dunia Islam terakhir, menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan stabilitas ekonomi dan keuangan di tengah-tengah pengaruh kolonialisme Eropa. Reformasi fiskal dan moneter yang diterapkan pada abad ke-19 mencerminkan upaya Utsmani dalam bertahan menghadapi tekanan eksternal dan internal.³

Meskipun kebijakan moneter di dunia Islam berhasil mendukung stabilitas ekonomi dalam jangka waktu yang lama, perubahan global seperti kolonialisme, krisis keuangan, dan perubahan jalur perdagangan mengharuskan adaptasi yang kadang sulit diimplementasikan.

Artikel ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan kunci terkait kebijakan moneter dalam sejarah dunia Islam, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan moneter berkembang pada masa Dinasti Umawiyah dan Abbasiyah?
2. Apa perbedaan kebijakan moneter di antara kerajaan-kerajaan Islam, seperti Fatimiyah, Mamluk, Safawiyah, dan Mughal?

¹ A.L. Udovitch, "Banking in the Medieval Islamic World," *The Journal of the Economic and Social History of the Orient*, Vol. 16, No. 2 (1973): hlm. 155-164.

² Hugh Kennedy, *Muslim Spain and Portugal: A Political History of Al-Andalus* (London: Routledge, 2014), hlm. 112-118.

³ Rifa'at Ali Abou-El-Haj, *Formation of the Modern State: The Ottoman Empire, Sixteenth to Eighteenth Centuries* (Albany: SUNY Press, 2005), hlm. 144-150.

3. Bagaimana Turki Utsmani merespons tantangan keuangan dan moneter di masa kemundurannya?
4. Apa dampak kebijakan moneter terhadap stabilitas ekonomi dan perdagangan internasional di dunia Islam?
5. Faktor internal dan eksternal apa saja yang memengaruhi perubahan kebijakan moneter di dunia Islam?

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran kebijakan moneter dalam sejarah ekonomi Islam, serta kontribusinya terhadap stabilitas politik dan ekonomi dunia Islam. Selain itu, Artikel ini juga dapat menjadi referensi bagi studi lebih lanjut mengenai bagaimana kebijakan moneter diadaptasi dalam konteks modern oleh negara-negara dengan sejarah Islam yang kuat.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan Artikel kualitatif. Dengan teknik dan menyajikan hasilnya dalam bentuk naratif, serta menegaskan dalam pencarian suatu makna, konsep serta pengertian ataupun mendeskripsikan tentang kejadian. Dalam pendekatan kualitatif ini terdapat kepustakaan dengan menggunakan buku-buku, literature yang relevan, dan jenis data berupa dokumen dalam sumber publikasi kemudian penulis mengkaji dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang terkumpul untuk mendeskripsikan masalah kebijakan moneter dalam ekonomi islam. Teknik pengumpulan data dilakukan mengikuti sumber publikasi tersebut. Deskriptif sendiri berarti hasil dideskriptifkan sejelas mungkin berdasarkan Artikel yang telah dilakukan tanpa menarik kesimpulan apapun dari Artikel tersebut.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

I Pengembangan Sistem Ekonomi pada Masa Dinasti Umawiyah

Dinasti Umawiyah (661-750 M) adalah salah satu dinasti paling signifikan dalam sejarah Islam, yang menandai transisi dari sistem pemerintahan kekhalifahan yang dipimpin oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW menuju pemerintahan monarki yang lebih terorganisir secara birokratis. Berdirinya Dinasti Umawiyah menjadi titik penting dalam sejarah politik, sosial, ekonomi, dan budaya dunia Islam.

Dinasti Umawiyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 661 M setelah berakhirnya masa Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat dan terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Setelah peristiwa arbitrase dalam Perang Siffin (657 M), Muawiyah berhasil memantapkan posisinya sebagai penguasa dunia Islam dengan memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Madinah ke Damaskus, sebuah langkah yang merefleksikan fokus kekuasaan yang lebih administratif dan imperialis.⁵

⁴ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2013), hlm. 45-52.

⁵ G.R. Hawting, *The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661-750* (London: Routledge, 2000), hlm. 15-19.

Muawiyah tidak hanya mendirikan dinasti Umawiyah sebagai kekuatan politik yang kuat, tetapi juga mengubah sistem pemerintahan Islam dari konsep kekhalifahan yang bersifat lebih egaliter menjadi kerajaan yang diwariskan secara turun-temurun. Ini merupakan perubahan besar dalam politik Islam, dan mulai dari sinilah pola monarki dalam dunia Islam berkembang di berbagai dinasti berikutnya.

Selama masa pemerintahan Umawiyah, kekhalifahan mengalami ekspansi terluas dalam sejarah Islam. Wilayah kekuasaan mereka meliputi kawasan yang sangat luas, mencakup Spanyol di barat hingga India di timur, dan kawasan Afrika Utara hingga Asia Tengah. Ekspansi yang masif ini bukan hanya memperluas wilayah, tetapi juga memperkenalkan Islam kepada berbagai suku, bangsa, dan kerajaan, serta membentuk lanskap politik dan budaya yang heterogen di bawah payung pemerintahan Umawiyah.⁶

Kebijakan ekspansi ini tidak hanya bertujuan untuk menyebarkan agama Islam, tetapi juga memperkuat kendali politik dan ekonomi. Sebagai hasil dari penaklukan tersebut, Dinasti Umawiyah mendapatkan akses ke berbagai pusat ekonomi dunia kuno, termasuk rute perdagangan penting di Mediterania, Laut Merah, dan Jalur Sutra.

Salah satu kontribusi besar Dinasti Umawiyah adalah dalam hal administrasi dan birokrasi. Muawiyah dan penerusnya mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan terorganisir dibandingkan dengan masa Khulafaur Rasyidin. Umawiyah mengadopsi banyak struktur birokrasi dari model pemerintahan Bizantium dan Sassania yang telah ditaklukkan. Penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi, perpajakan, dan pemerintahan adalah salah satu pencapaian penting dari masa ini, yang mengukuhkan identitas politik Islam di seluruh wilayah yang dikuasai.

Dalam hal administrasi fiskal, Dinasti Umawiyah mengembangkan sistem perpajakan yang lebih terstruktur. Mereka menerapkan pajak *kharaj* untuk tanah yang ditaklukkan dan pajak *jizyah* untuk non-Muslim, yang menjadi sumber pendapatan utama kekhalifahan. Pembentukan lembaga diwan, seperti *Diwan al-Kharaj* (departemen perpajakan), adalah cerminan dari organisasi fiskal yang semakin maju pada masa ini.⁷

Kebijakan Moneter dan Ekonomi

Kebijakan moneter Umawiyah juga memainkan peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pemerintahan. Pada masa ini, dimulailah pencetakan koin dinar emas dan dirham perak yang distandarisasi sebagai mata uang resmi kekhalifahan, menggantikan koin-koin dari Bizantium dan Sassania yang sebelumnya digunakan. Penggunaan koin emas dan perak ini tidak hanya mendukung perdagangan di wilayah yang luas, tetapi juga memperkuat legitimasi kekuasaan Umawiyah, di mana koin-koin tersebut menampilkan tulisan dalam bahasa Arab dan mencerminkan identitas Islam.

Standarisasi mata uang ini memungkinkan pertumbuhan perdagangan internasional yang lebih efisien, terutama di wilayah Mediterania dan Asia, yang menjadi pusat

⁶ Hugh Kennedy, *The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century* (London: Routledge, 2015), hlm. 84-90.

⁷ Hugh Kennedy, *The Armies of the Caliphs: Military and Society in the Early Islamic State* (London: Routledge, 2001), hlm. 113-120.

perdagangan global pada masa itu. Dengan adanya sistem moneter yang stabil, Dinasti Umawiyah berhasil menciptakan integrasi ekonomi di wilayah yang luas dan beragam.

1. Mata Uang

Salah satu pencapaian paling signifikan Dinasti Umawiyah dalam bidang ekonomi adalah standarisasi mata uang Islam. Pada masa kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (685–705 M), Umawiyah memutuskan untuk mencetak mata uang dinar emas dan dirham perak, yang menggantikan koin-koin dari Byzantium dan Persia yang sebelumnya digunakan di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Hal ini memiliki beberapa implikasi penting:

- i. **Standarisasi Nilai Mata Uang:** Dengan diperkenalkannya dinar dan dirham, dunia Islam memiliki sistem moneter yang seragam. Standarisasi ini membantu memperkuat ekonomi dengan menciptakan kepercayaan pada mata uang yang stabil dan terkontrol.
- ii. **Mendukung Perdagangan Internasional:** Koin dinar dan dirham menjadi alat tukar utama dalam perdagangan internasional di seluruh dunia Islam, bahkan hingga Eropa, Afrika Utara, dan Asia. Koin-koin ini digunakan di berbagai pusat perdagangan, menciptakan sistem ekonomi lintas wilayah yang lebih terintegrasi.
- iii. **Simbol Identitas Islam:** Selain dari sisi ekonomi, mata uang yang dicetak dengan kaligrafi Arab dan simbol Islam memperkuat identitas politik dan religius Umawiyah, sekaligus menunjukkan kedaulatan dan kekuasaan mereka di wilayah luas.

2. Sistem Pajak

Sistem perpajakan menjadi tulang punggung keuangan Dinasti Umawiyah. Pemerintah Umawiyah mengembangkan dua jenis pajak utama, yaitu *kharaj* dan *jizyah*, الخراج والجزية

yang mengamankan pendapatan negara secara signifikan:

i. Kharaj (Pajak Tanah)

- a. Kharaj adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik tanah yang bukan Muslim di wilayah yang ditaklukkan. Pajak ini diterapkan di seluruh kekhalifahan dan menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara. Pemungutan kharaj memungkinkan pemerintah mengontrol dan mengelola tanah-tanah subur, terutama di daerah pertanian yang penting seperti Mesopotamia dan Mesir.

ii. Jizyah (Pajak Kepala untuk Non-Muslim)

- a. Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-Muslim (termasuk Yahudi dan Kristen) yang tinggal di wilayah kekhalifahan Umawiyah. Pajak ini dianggap sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan oleh negara Islam kepada mereka. Penerapan jizyah membantu meningkatkan pendapatan negara sekaligus menjaga harmoni antaragama di wilayah yang didominasi oleh Muslim dan non-Muslim.

iii. Zakat (Pajak untuk Muslim)

Bagi penduduk Muslim, zakat diterapkan sebagai kewajiban religius, di mana sebagian dari pendapatan atau hasil pertanian mereka diberikan untuk mendukung kegiatan sosial dan distribusi kekayaan. Zakat digunakan untuk membantu kaum miskin dan memperkuat solidaritas sosial di bawah hukum Islam.⁸

3. Pertanian dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Dinasti Umayyad menyadari pentingnya pertanian sebagai sumber pendapatan utama dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Mereka mendorong pengembangan lahan pertanian, terutama di wilayah yang ditaklukkan, seperti Mesir, Irak, dan Persia, yang memiliki lahan subur dan akses ke sistem irigasi besar.⁹

- i. **Sistem Irigasi:** Dinasti Umayyad mengembangkan dan memperluas jaringan irigasi di wilayah-wilayah pertanian utama, seperti lembah Sungai Eufrat dan Tigris di Irak serta lembah Sungai Nil di Mesir. Sistem irigasi ini meningkatkan produksi pertanian dan memfasilitasi perdagangan pangan.
- ii. **Eksplorasi Sumber Daya Alam:** Selain pertanian, Dinasti Umayyad juga memanfaatkan sumber daya alam lainnya, termasuk hasil tambang emas dan perak yang digunakan dalam pencetakan koin, serta hasil laut dan hutan di wilayah pesisir. Sumber daya alam ini menjadi bagian dari ekonomi yang mendukung perdagangan dan kebijakan moneter.

4. Perdagangan Internasional

Dinasti Umayyad memanfaatkan posisinya yang strategis di antara benua Asia, Afrika, dan Eropa untuk membangun jaringan perdagangan yang kuat. Perdagangan ini melibatkan pertukaran barang-barang berharga seperti rempah-rempah, sutra, kuda, dan logam mulia.¹⁰ Beberapa aspek utama perdagangan internasional pada masa Umayyad termasuk:

- **Pengembangan Rute Perdagangan:** Umayyad mengontrol berbagai jalur perdagangan penting, termasuk Jalur Sutra yang menghubungkan dunia Islam dengan Asia Tengah dan Tiongkok, serta rute maritim di Laut Merah dan Samudra Hindia. Ini membuka peluang perdagangan dengan berbagai kerajaan di Asia, Afrika, dan Eropa, yang memperkuat ekonomi Umayyad.
- **Pelabuhan dan Pusat Perdagangan:** Pelabuhan-pelabuhan besar seperti di Basra dan Alexandria menjadi pusat perdagangan internasional. Dari sini, barang-barang diperdagangkan ke berbagai wilayah kekhalifahan dan juga ke

⁸ Jonathan A.C. Brown, *Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy* (London: Oneworld Publications, 2014), hlm. 110-115.

⁹ Hugh Kennedy, *The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century* (London: Routledge, 2015), hlm. 152-157.

¹⁰ Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), hlm. 148-155.

luar negeri, termasuk Kekaisaran Romawi Timur (Byzantium) dan Kerajaan-kerajaan di India dan Afrika Timur.

- **Perdagangan Budak dan Hasil Alam:** Salah satu aspek penting perdagangan pada masa itu adalah perdagangan budak, yang menjadi bagian dari ekonomi Umawiyah. Selain itu, hasil pertanian dan barang manufaktur seperti kain dan keramik juga diperdagangkan dalam skala luas.

5. Sistem Administrasi Ekonomi dan Keuangan

Dinasti Umawiyah mengembangkan birokrasi yang efisien untuk mengelola perekonomian kekhalifahan yang luas. Administrasi pusat di Damaskus dan di provinsi-provinsi yang dikuasai Umawiyah dikendalikan oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh khalifah.

- **Pengelolaan Fiskal:** Pejabat administrasi di setiap provinsi bertanggung jawab untuk mengelola penerimaan pajak dan mengirimkannya ke pusat kekhalifahan. Administrasi fiskal yang ketat dan terorganisir ini memastikan bahwa pendapatan negara tetap stabil dan digunakan untuk memperkuat kekuasaan Umawiyah.
- **Diwan al-Kharaj (Departemen Perpajakan):** Departemen ini bertanggung jawab atas pengelolaan pajak tanah dan pajak kepala (jizyah) di wilayah kekhalifahan. Diwan al-Kharaj berperan penting dalam memastikan aliran pendapatan yang stabil dari wilayah yang ditaklukkan ke pusat pemerintahan di Damaskus.

6. Kemajuan Infrastruktur Ekonomi

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, Dinasti Umawiyah juga fokus pada pengembangan infrastruktur yang kuat, termasuk:

- **Jaringan Jalan Raya:** Umawiyah membangun dan memperbaiki jalan-jalan raya yang menghubungkan kota-kota besar di wilayah kekhalifahan. Jaringan jalan ini penting untuk mobilisasi pasukan dan pengiriman barang-barang perdagangan.
- **Kota-kota Dagang:** Beberapa kota besar, seperti Damaskus, Baghdad, dan Basra, berkembang menjadi pusat perdagangan dan ekonomi di bawah kekuasaan Umawiyah. Kota-kota ini tidak hanya menjadi pusat administrasi politik tetapi juga menjadi tempat bertemunya pedagang dari berbagai wilayah.

7. Tantangan Ekonomi

Walaupun Dinasti Umawiyah memiliki banyak pencapaian dalam bidang ekonomi, mereka juga menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah ketidakstabilan sosial akibat diskriminasi terhadap *mawali* (non-Arab Muslim) dalam distribusi kekayaan dan jabatan, serta kesulitan dalam mengelola wilayah yang sangat luas. Ketegangan internal ini berkontribusi pada penurunan kekuasaan Umawiyah dan

akhirnya menggiring kejatuhan mereka pada tahun 750 M, saat Dinasti Abbasiyah mengambil alih kekuasaan.¹¹

Sistem ekonomi pada masa Umawiyah dapat digambarkan sebagai upaya ambisius untuk mengelola kekhalifahan yang luas dan heterogen dengan menggunakan kebijakan moneter, perpajakan, dan perdagangan yang efektif. Ini menjadi landasan bagi perkembangan ekonomi dunia Islam di masa-masa berikutnya, khususnya pada masa Dinasti Abbasiyah yang mewarisi banyak kebijakan ekonomi Umawiyah.

8. Tantangan Sosial dan Politik

Meski Dinasti Umawiyah mencapai banyak kesuksesan dalam hal administrasi, ekspansi, dan kebijakan ekonomi, mereka juga menghadapi berbagai tantangan sosial dan politik. Salah satu tantangan terbesar berasal dari ketidakpuasan di kalangan kaum Muslim non-Arab (mawali) yang merasa diperlakukan tidak adil oleh sistem kekhalifahan yang cenderung lebih mengutamakan bangsa Arab. Kebijakan diskriminatif terhadap kaum mawali dalam hal pajak dan kedudukan sosial menyebabkan ketegangan yang semakin meningkat.

Selain itu, Dinasti Umawiyah sering dianggap terlalu sekuler oleh sebagian kelompok Muslim yang menginginkan pemerintahan lebih religius. Ketidakpuasan ini puncaknya terlihat dalam pemberontakan Abbasiyah, yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat yang merasa diabaikan oleh kekuasaan Umawiyah. Pemberontakan ini akhirnya berhasil menggulingkan Dinasti Umawiyah pada tahun 750 M, ketika Abu al-Abbas mendirikan Dinasti Abbasiyah.

Meskipun kekuasaan Dinasti Umawiyah berakhir di Timur pada tahun 750 M, dinasti ini meninggalkan warisan yang sangat signifikan bagi dunia Islam. Salah satu warisan terbesarnya adalah penciptaan sebuah negara yang luas dan bersatu di bawah sistem birokrasi yang terorganisir, dengan bahasa Arab sebagai bahasa administratif dan mata uang yang distandarisasi. Selain itu, Dinasti Umawiyah juga membuka jalan bagi penyebaran budaya, seni, dan ilmu pengetahuan Islam ke seluruh dunia.

Di wilayah barat, cabang Dinasti Umawiyah melanjutkan kekuasaan mereka di Spanyol dengan mendirikan Kekhalifahan Umayyah di Cordoba, yang berlangsung hingga abad ke-11. Kekuasaan ini memainkan peran penting dalam perkembangan peradaban Islam di Eropa dan mempertahankan kemajuan intelektual serta ekonomi selama berabad-abad.¹²

Dengan latar belakang ini, kita bisa memahami bagaimana Dinasti Umawiyah tidak hanya berperan dalam perkembangan politik dan agama Islam, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan sistem ekonomi yang stabil dan terintegrasi, yang dampaknya terasa hingga masa-masa berikutnya dalam sejarah dunia Islam.

II Pengembangan Sistem Ekonomi pada Masa Dinasti Abbasiyah

¹¹ Hoyland, Robert G. *Seeing Islam as Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian, Jewish, and Zoroastrian Writings on Early Islam*. Darwin Press, 1997, hlm. 195-200.

¹² Kennedy, Hugh. *Muslim Spain: 711-1492*. Routledge, 1996, hlm. 98-102.

Dinasti Abbasiyah (750–1258 M) adalah salah satu periode paling penting dalam sejarah Islam, terutama dalam bidang ekonomi. Kekhalifahan Abbasiyah menggantikan Dinasti Umayyiah dan membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan ekonomi. Periode ini ditandai dengan kemajuan dalam perdagangan internasional, pengembangan sektor pertanian, peningkatan infrastruktur ekonomi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

1. Penguatan Sistem Pajak dan Administrasi Keuangan

Salah satu aspek terpenting dalam sistem ekonomi Dinasti Abbasiyah adalah penguatan dan perluasan sistem perpajakan serta administrasi keuangan negara. Seperti pada masa Umayyiah, pajak menjadi sumber utama pendapatan pemerintah, tetapi Dinasti Abbasiyah melakukan reformasi dan memperluas skala pengelolaan pajak.

- **Kharaj (Pajak Tanah) dan Ushr (Pajak Pertanian):** Pajak tanah (kharaj) tetap menjadi sumber pendapatan utama, terutama di daerah yang subur seperti Irak dan Mesir. Pajak ini dikenakan pada pemilik tanah, baik Muslim maupun non-Muslim, berdasarkan luas dan hasil lahan mereka. Di samping itu, *ushr* (pajak hasil pertanian) diterapkan kepada petani Muslim yang memiliki tanah di wilayah kekhalifahan.
- **Jizyah (Pajak Non-Muslim):** Pajak jizyah yang dikenakan pada non-Muslim di bawah pemerintahan Islam terus diberlakukan, tetapi dengan pendekatan yang lebih sistematis. Pajak ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga bagian dari sistem proteksi yang ditawarkan negara kepada penduduk non-Muslim.
- **Zakat:** Zakat juga tetap menjadi kewajiban keagamaan bagi Muslim, yang dikelola secara lebih terstruktur oleh pemerintah Abbasiyah untuk mendukung kegiatan sosial dan membantu kaum miskin. Zakat didistribusikan melalui lembaga negara dan digunakan untuk mendanai berbagai proyek amal dan pembangunan infrastruktur.

Dinasti Abbasiyah juga membentuk birokrasi yang lebih profesional untuk mengelola pengumpulan dan alokasi pajak. Mereka menciptakan sistem pencatatan yang lebih efisien dengan memperkenalkan lembaga diwan (departemen administrasi) yang terpisah untuk pajak, perdagangan, dan keuangan negara. Ini membantu meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi di dalam pemerintahan.¹³

2. Ibu Kota Baru: Baghdad sebagai Pusat Ekonomi

Salah satu langkah besar Dinasti Abbasiyah dalam mengembangkan ekonomi adalah pendirian Baghdad sebagai ibu kota baru pada tahun 762 M oleh Khalifah al-Mansur. Kota ini didesain secara khusus sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan intelektual dunia Islam, dan dengan cepat berkembang menjadi salah satu kota terbesar dan terkaya di dunia pada masa itu.

- **Pusat Perdagangan Internasional:** Baghdad terletak di lokasi strategis di antara sungai Tigris dan Eufrat, yang memungkinkannya menjadi pusat

¹³ Ibn Khallikan, Ahmad. *The History of the Abbasid Caliphate*. Dar al-Ma'arif, 1993, hlm. 205-210.

perdagangan yang menghubungkan Timur dan Barat. Jalur perdagangan dari Tiongkok, India, Afrika, dan Eropa bertemu di Baghdad, menjadikannya titik pertemuan bagi para pedagang, pelancong, dan intelektual dari berbagai wilayah. Ini menciptakan aliran barang, uang, dan informasi yang memperkuat ekonomi Abbasiyah.

- **Pasar dan Industri:** Baghdad juga menjadi rumah bagi pasar-pasar besar (souk) yang memperdagangkan segala macam barang, dari kain sutra, rempah-rempah, hingga peralatan teknologi seperti astrolabe. Selain itu, Baghdad menjadi pusat produksi berbagai industri, termasuk tekstil, keramik, kertas, dan perhiasan, yang dijual di dalam negeri dan diekspor ke wilayah-wilayah lain.
- **Pertumbuhan Kota-kota Lain:** Selain Baghdad, kota-kota besar lainnya seperti Basra, Mosul, Kufa, dan Samarra juga berkembang menjadi pusat perdagangan dan ekonomi yang penting. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah kekhalifahan dan memperkuat jaringan perdagangan internal.

3. Perdagangan Internasional dan Ekspansi Ekonomi Global

Dinasti Abbasiyah mengembangkan perdagangan internasional ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan masa sebelumnya. Jalur-jalur perdagangan global yang terbentang dari Asia hingga Eropa dan Afrika memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi Abbasiyah. Beberapa aspek penting dari perdagangan internasional ini antara lain:

- **Rute Darat dan Laut:** Dinasti Abbasiyah memanfaatkan dua jalur utama perdagangan, yaitu rute darat seperti Jalur Sutra yang menghubungkan dunia Islam dengan Asia Tengah dan Tiongkok, serta rute laut melalui Samudra Hindia, Laut Merah, dan Teluk Persia. Para pedagang Abbasiyah mengekspor barang-barang seperti tekstil, rempah-rempah, keramik, dan hasil tambang, serta mengimpor komoditas berharga dari Tiongkok, India, Afrika, dan Eropa.
- **Perdagangan Budak dan Barang Mewah:** Seperti pada masa Umawiyah, perdagangan budak menjadi bagian dari perekonomian Abbasiyah. Selain itu, barang-barang mewah seperti sutra, perhiasan, dan rempah-rempah sangat diminati oleh pasar internasional dan menjadi sumber pendapatan besar bagi kekhalifahan.
- **Mitra Dagang:** Kekhalifahan Abbasiyah menjalin hubungan dagang dengan berbagai kekuatan dunia, termasuk Kekaisaran Bizantium, India, dan Tiongkok, serta kerajaan-kerajaan Afrika dan Eropa. Hubungan perdagangan ini memperluas pengaruh Abbasiyah dalam perekonomian dunia dan menjadikan Baghdad sebagai pusat ekonomi internasional.

4. Pembangunan Infrastruktur Ekonomi

Dinasti Abbasiyah juga fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur ini mencakup pembangunan jalan, saluran irigasi,

pelabuhan, dan sistem transportasi yang memperlancar perdagangan serta meningkatkan produktivitas pertanian.

- **Jaringan Jalan dan Kafilah Dagang:** Dinasti Abbasiyah memperluas jaringan jalan raya dan rute-rute kafilah dagang yang menghubungkan kota-kota besar di seluruh kekhalifahan. Jaringan ini penting untuk memobilisasi perdagangan, militer, dan komunikasi antar wilayah yang luas.
- **Sistem Irigasi dan Pertanian:** Seperti Dinasti Umawiyah, Abbasiyah juga berinvestasi dalam pengembangan sistem irigasi yang kompleks, terutama di wilayah yang subur seperti Mesopotamia dan Mesir. Sistem irigasi ini memungkinkan peningkatan produksi pertanian yang berkontribusi pada stabilitas pangan dan ekonomi.
- **Pelabuhan dan Pusat Perdagangan:** Dinasti Abbasiyah mengembangkan pelabuhan-pelabuhan besar seperti Basra, Siraf, dan Aden yang menjadi pusat perdagangan internasional. Pelabuhan-pelabuhan ini memperlancar ekspor dan impor barang-barang ke wilayah-wilayah lain, terutama ke Tiongkok, India, dan Afrika Timur.

5. Sistem Perbankan dan Keuangan

Pada masa Abbasiyah, sistem keuangan dan perbankan mengalami kemajuan pesat. Hal ini terkait dengan berkembangnya perdagangan internasional yang memerlukan lembaga-lembaga keuangan yang lebih maju dan terstruktur.

- **Penggunaan Cek dan Surat Kredit:** Abbasiyah memperkenalkan sistem *sakk* (cek) yang memungkinkan para pedagang untuk melakukan transaksi jarak jauh tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah besar. Sistem ini sangat membantu dalam perdagangan internasional dan mengurangi risiko perampokan serta mempermudah proses transaksi.
- **Lembaga Keuangan dan Perbankan:** Lembaga-lembaga keuangan seperti rumah dagang (karavanserai) dan bank swasta mulai bermunculan di kota-kota besar seperti Baghdad dan Basra. Lembaga-lembaga ini memberikan layanan seperti penyimpanan uang, pemberian pinjaman, dan pertukaran mata uang, yang memfasilitasi perdagangan dan investasi.

6. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Salah satu kontribusi terbesar Dinasti Abbasiyah terhadap ekonomi adalah kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung perkembangan industri dan perdagangan. Pada masa keemasan Abbasiyah, berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan teknologi berkembang pesat. Beberapa kontribusi ini termasuk:

- **Pengembangan Sistem Angka dan Matematika:** Ilmuwan Muslim pada masa Abbasiyah mengadopsi dan mengembangkan sistem angka India yang kemudian dikenal sebagai angka Arab. Kemajuan dalam matematika ini memungkinkan penghitungan yang lebih akurat dalam perdagangan dan administrasi keuangan.

- **Inovasi Teknologi:** Inovasi dalam bidang pertanian, manufaktur, dan teknologi maritim mendukung produktivitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Teknologi irigasi, teknik pertanian, serta pembuatan kertas dari Tiongkok diadaptasi dan dikembangkan oleh para ilmuwan Abbasiyah.

7. Tantangan Ekonomi pada Masa Abbasiyah

Meskipun Dinasti Abbasiyah mencapai puncak kejayaan ekonomi, kekhalifahan ini juga menghadapi tantangan besar yang mempengaruhi stabilitas ekonomi mereka, terutama setelah abad ke-9:

- **Ketegangan Sosial dan Politik:** Dinasti Abbasiyah mengalami ketegangan internal, termasuk pemberontakan oleh kelompok-kelompok sektarian dan perlawanan dari provinsi-provinsi yang jauh dari pusat kekuasaan di Baghdad. Hal ini menyebabkan fragmentasi kekhalifahan dan melemahkan kontrol ekonomi di beberapa wilayah.
- **Serangan Luar:** Serangan dari bangsa Mongol dan tentara Salib juga menimbulkan dampak besar pada ekonomi Abbasiyah. Serangan Mongol pada tahun 1258, yang menghancurkan Baghdad, menandai berakhirnya Dinasti Abbasiyah secara efektif dan runtuhnya sistem ekonomi pusat.

Dinasti Abbasiyah adalah era di mana ekonomi dunia Islam mencapai kemajuan pesat melalui inovasi dalam perdagangan, administrasi fiskal, dan infrastruktur ekonomi. Dengan Baghdad sebagai pusat ekonomi global, Dinasti Abbasiyah memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama dunia pada masa itu.¹⁴

III Perbandingan kebijakan moneter antara Dinasti Abbasiyah dan Dinasti Umawiyah di Spanyol (Al-Andalus)

Menyoroti perbedaan dalam cara pengelolaan ekonomi dan kebijakan keuangan, meskipun keduanya berada dalam konteks peradaban Islam. Kedua dinasti tersebut memainkan peran penting dalam mengembangkan ekonomi, dengan pendekatan yang berbeda terkait dengan pencetakan mata uang, sistem perpajakan, dan stabilitas ekonomi di wilayah mereka.

1. Kebijakan Pencetakan Mata Uang

- **Dinasti Abbasiyah (Baghdad)**
 - a) Pada masa Dinasti Abbasiyah, kebijakan moneter sangat terpusat di ibu kota kekhalifahan, Baghdad. Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Dinasti Umawiyah menciptakan standar mata uang Islam dengan pencetakan koin dinar emas dan dirham perak, yang kemudian diteruskan oleh Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah memperluas cakupan penggunaan dinar dan dirham di seluruh wilayah kekhalifahan, termasuk

¹⁴ Kennedy, Hugh. *The Prophet and the Age of the Caliphates*. Pearson Education, 2004, hlm. 125-130.

bagian Asia dan Afrika Utara, yang menjadikannya alat tukar utama dalam perdagangan internasional.

- b) Di bawah Abbasiyah, pencetakan koin tetap menjadi kebijakan yang terkontrol ketat oleh negara. Koin-koin mereka dicetak dengan kaligrafi Arab yang memuat pesan religius dan politik, yang mencerminkan kekuatan Abbasiyah sebagai pemimpin dunia Islam. Mereka memprioritaskan stabilitas nilai mata uang untuk menjaga inflasi tetap rendah dan mendukung perdagangan internasional yang luas.

- **Dinasti Umawiyah di Spanyol (Al-Andalus)**

- a) Di Spanyol, Umawiyah melanjutkan kebijakan pencetakan koin yang terpisah dari pusat kekhalifahan Abbasiyah. Setelah kekalahan Umawiyah di Timur Tengah pada 750 M, anggota keluarga Umawiyah yang selamat, Abdurrahman I, mendirikan Emirat Cordoba di Al-Andalus. Di sini, mereka juga mencetak dinar dan dirham dengan desain yang sedikit berbeda dari koin Abbasiyah, meskipun sistem standarnya tetap sama.
- b) Dinasti Umawiyah di Spanyol mengembangkan ekonomi berbasis pada sumber daya lokal, dan mereka mencetak koin yang memproyeksikan identitas politik mereka yang independen dari Abbasiyah, meskipun tetap mengikuti prinsip dasar Islam terkait dengan mata uang.

2. Sistem Pajak dan Pengelolaan Fiskal

- **Dinasti Abbasiyah**

- a. Abbasiyah mengembangkan birokrasi fiskal yang lebih terorganisir dibandingkan dengan Umawiyah. Mereka menciptakan departemen pajak (diwan al-kharaj) yang secara sistematis mengelola pajak tanah (kharaj) dan pajak kepala untuk non-Muslim (jizyah). Sistem perpajakan Abbasiyah lebih terstruktur dan terpusat di Baghdad, memungkinkan kontrol yang lebih ketat terhadap pengelolaan ekonomi di wilayah kekhalifahan.
- b. Abbasiyah juga menciptakan sistem zakat yang lebih teratur, di mana pajak yang dikumpulkan dari Muslim digunakan untuk tujuan amal dan pembangunan infrastruktur. Pengelolaan pajak ini menjadi fondasi bagi stabilitas ekonomi Abbasiyah, meskipun tantangan politik dan sosial menyebabkan keretakan di beberapa provinsi.

- b) **Dinasti Umawiyah di Spanyol**

- a. Di Al-Andalus, sistem perpajakan yang diadopsi oleh Dinasti Umawiyah serupa dengan sistem yang diterapkan oleh Abbasiyah, tetapi lebih terdesentralisasi. Sebagai wilayah yang terpisah dari pusat kekhalifahan Abbasiyah, Umawiyah di Spanyol menjalankan kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Mereka tetap memungut pajak tanah (kharaj) dan pajak kepala (jizyah) dari penduduk non-Muslim, tetapi manajemen fiskalnya lebih fokus pada kepentingan regional.

- b) Karena wilayah Spanyol Umawiyah memiliki lebih banyak penduduk Kristen dan Yahudi, pengelolaan pajak jizyah memainkan peran penting dalam mendanai pemerintahan Umawiyah di Al-Andalus. Sementara itu, pajak zakat yang dikenakan kepada Muslim juga digunakan untuk memperkuat ekonomi domestik dan mendukung berbagai proyek pembangunan di Cordoba dan sekitarnya.

3. Perdagangan Internasional dan Peran Ekonomi Global

- **Dinasti Abbasiyah**

- a) Abbasiyah mengembangkan jaringan perdagangan global yang sangat luas, dengan Baghdad sebagai pusat ekonomi dunia Islam. Dinasti ini memperluas jalur perdagangan hingga ke Tiongkok, India, Afrika Timur, dan Eropa, menjadikan mata uang dinar dan dirham sebagai alat tukar utama di seluruh wilayah ini. Perdagangan barang mewah seperti sutra, rempah-rempah, dan logam mulia menjadi pendorong utama perekonomian Abbasiyah.
- b) Stabilitas mata uang dan kebijakan perdagangan Abbasiyah mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan selama berabad-abad, meskipun pada abad ke-10, masalah politik dan militer mulai menggerogoti kekhalifahan.

- **Dinasti Umawiyah di Spanyol**

- a) Sementara itu, Umawiyah di Spanyol juga memainkan peran penting dalam perdagangan internasional, terutama melalui pelabuhan-pelabuhan di selatan Al-Andalus seperti Algeciras dan Seville. Mereka berpartisipasi dalam perdagangan Mediterania yang menghubungkan Afrika Utara, Eropa Selatan, dan Timur Tengah. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah emas, perak, zaitun, kain wol, dan barang-barang mewah.
- b) Karena posisinya di ujung barat dunia Islam, Al-Andalus berperan sebagai jembatan antara dunia Islam dan Kristen di Eropa. Umawiyah di Spanyol juga menjalin hubungan dagang yang erat dengan Kekaisaran Bizantium, Kerajaan Kristen di Eropa, dan dinasti-dinasti Islam di Afrika Utara.

4. Perbedaan dalam Stabilitas dan Pengelolaan Ekonomi

- **Dinasti Abbasiyah**

- a) Abbasiyah pada awalnya berhasil menciptakan stabilitas ekonomi yang kuat melalui kebijakan terpusat yang efisien. Namun, setelah abad ke-9, mulai terjadi desentralisasi kekuasaan dan pemberontakan di berbagai wilayah, yang melemahkan kontrol pusat. Fragmentasi politik ini mempengaruhi stabilitas moneter dan sistem pajak di beberapa provinsi, meskipun Baghdad tetap menjadi pusat ekonomi utama.

- b) Selain itu, pengeluaran besar untuk militer dan konflik internal turut membebani keuangan kekhalifahan. Pada akhirnya, serangan Mongol pada 1258 menghancurkan Baghdad dan mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah di Timur.

- **Dinasti Umawiyah di Spanyol**

- a) Umawiyah di Spanyol menikmati stabilitas yang lebih panjang di bidang ekonomi selama hampir tiga abad. Wilayah Al-Andalus memiliki sumber daya yang melimpah dan pertanian yang subur, yang mendukung perekonomian lokal. Selain itu, pengelolaan ekonomi yang lebih desentralisasi memberikan kelenturan dalam menghadapi tantangan regional.
- b) Stabilitas ini memungkinkan kemajuan ekonomi dan budaya yang signifikan, terutama pada masa Khalifah Abdurrahman III dan penerusnya. Namun, menjelang akhir abad ke-11, tekanan politik dan sosial, serta invasi Kristen, mulai menggerogoti kekuatan Umawiyah di Spanyol.

Secara umum, baik Dinasti Abbasiyah maupun Umawiyah di Spanyol mengembangkan kebijakan moneter dan ekonomi yang kuat dengan pendekatan yang berbeda:

- **Dinasti Abbasiyah** lebih terpusat dan memanfaatkan pengaruh global yang lebih luas melalui jaringan perdagangan lintas benua dan birokrasi yang terorganisir.
- **Dinasti Umawiyah di Spanyol** lebih desentralisasi dan berfokus pada ekonomi lokal dan perdagangan regional, dengan fokus besar pada integrasi Eropa dan Mediterania.

Kedua dinasti ini berhasil menciptakan sistem ekonomi yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas, meskipun keduanya pada akhirnya menghadapi tantangan politik dan militer yang melemahkan kekuatan mereka.

IV Kebijakan Moneter pada Masa Kerajaan-Kerajaan Kecil (Fatimiyah, Mamalik, Persia, India)

Setelah masa kejayaan Dinasti Abbasiyah, berbagai kerajaan Islam kecil mulai muncul di berbagai wilayah yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan pusat. Setiap kerajaan ini, seperti Dinasti Fatimiyah di Mesir, Dinasti Mamluk, kerajaan-kerajaan di Persia, dan kerajaan Islam di India, mengembangkan kebijakan moneter dan keuangan mereka sendiri, disesuaikan dengan situasi geografis, politik, dan ekonomi setempat.¹⁵ Berikut adalah gambaran kebijakan moneter yang diterapkan pada masa kerajaan-kerajaan kecil tersebut:

1. Dinasti Fatimiyah (909–1171 M)

¹⁵ Ayalon, David. *The Mamluks in Egyptian Politics and Society*. Cambridge University Press, 1992, hlm. 98-102.

Dinasti Fatimiyah memerintah wilayah Afrika Utara, Mesir, dan sebagian Levant, dengan ibu kotanya di Kairo. Dinasti ini, yang merupakan penguasa Syiah Ismailiyah, terkenal dengan inovasi dan stabilitas ekonomi di wilayah kekuasaannya.

- **Pencetakan Mata Uang Sendiri:** Fatimiyah mencetak koin emas, dinar, yang dikenal karena kemurniannya yang tinggi. Penggunaan koin emas ini memberikan keunggulan ekonomi bagi Fatimiyah dalam perdagangan internasional. Mereka mencetak dinar dengan simbol-simbol Ismailiyah Syiah dan kaligrafi Arab yang mencerminkan otonomi politik mereka dari Abbasiyah di Baghdad.
- **Peran Kairo sebagai Pusat Perdagangan:** Fatimiyah memanfaatkan posisi strategis Kairo sebagai pusat perdagangan yang menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah, serta Afrika Utara dengan Timur Tengah. Hal ini menjadikan ekonomi mereka berkembang pesat. Mereka mengontrol sebagian besar rute perdagangan internasional yang menghubungkan Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.
- **Sistem Pajak yang Efisien:** Kebijakan pajak Dinasti Fatimiyah mirip dengan yang ada di Dinasti Abbasiyah, dengan pajak tanah (kharaj) dan pajak untuk non-Muslim (jizyah). Namun, Fatimiyah menerapkan pajak yang lebih ringan bagi penduduk non-Muslim, yang berkontribusi pada keragaman ekonomi dan sosial di wilayah mereka, terutama karena Mesir memiliki populasi Kristen Koptik yang besar.

2. Dinasti Mamluk (1250–1517 M)

Dinasti Mamluk, yang memerintah Mesir dan Levant setelah berakhirnya kekuasaan Fatimiyah dan Ayyubiyah, terkenal dengan kekuatan militernya serta kebijakan ekonomi yang mendukung stabilitas ekonomi dan perdagangan internasional.

- **Sistem Moneter dan Perdagangan:** Dinasti Mamluk melanjutkan tradisi pencetakan dinar emas dan dirham perak yang stabil. Koin Mamluk diperdagangkan luas di seluruh dunia Islam, dan mereka berhasil menjaga standar tinggi dalam kemurnian emas, yang memberikan kepercayaan di pasar internasional.
- **Kontrol atas Jalur Perdagangan:** Mamluk mengendalikan rute perdagangan yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa, termasuk jalur penting dari Laut Merah ke Laut Tengah. Mereka memanfaatkan letak geografis mereka dengan mendominasi perdagangan rempah-rempah dan produk-produk berharga dari Timur Jauh.
- **Infrastruktur Ekonomi dan Pajak:** Mamluk juga terkenal karena memperkuat infrastruktur ekonomi Mesir, termasuk pembangunan saluran irigasi untuk mendukung sektor pertanian. Sistem perpajakan mereka berfokus pada sektor pertanian, serta pengenaan bea cukai di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Alexandria.
- **Kebijakan Moneter Berbasis Tentara:** Mamluk, yang berasal dari budak militer yang dibebaskan, menekankan anggaran besar untuk mempertahankan pasukan militer mereka. Sebagian besar anggaran negara diarahkan untuk mendukung

keberadaan militer yang kuat, yang berdampak pada penurunan pengeluaran untuk proyek-proyek sipil dalam jangka panjang.

3. Kerajaan-Kerajaan Persia

Setelah runtuhnya Abbasiyah dan melemahnya pengaruh pusat, Persia menjadi tempat lahirnya beberapa dinasti kecil yang memerintah secara terpisah, seperti Dinasti Buyid, Seljuk, dan Safawiyah.¹⁶ Setiap dinasti ini memiliki kebijakan moneter dan ekonomi yang mencerminkan kondisi lokal Persia.

- i. Dinasti Buyid (934–1062 M):
 - a) Buyid menguasai Persia dan Irak pada saat Abbasiyah mulai melemah. Buyid mencetak koin yang menunjukkan otonomi mereka, tetapi mereka tetap mempertahankan pengaruh mata uang Abbasiyah, seperti dinar dan dirham.
 - b) Sistem perpajakan Buyid sangat dipengaruhi oleh struktur tanah feodal di Persia, dengan pajak yang dikumpulkan dari tuan tanah lokal.
- ii. Dinasti Seljuk (1037–1194 M):
 - a) Seljuk, yang berasal dari Turki, mencetak koin mereka sendiri dengan nama para penguasa Seljuk di samping Khalifah Abbasiyah sebagai simbol legitimasi politik.
 - b) Kebijakan perpajakan Seljuk lebih militeristik, dengan sebagian besar pendapatan digunakan untuk mendanai ekspansi militer dan mempertahankan pasukan mereka.
- iii. Dinasti Safawiyah (1501–1736 M):
 - a) Safawiyah memperkenalkan reformasi ekonomi besar-besaran, termasuk pencetakan koin baru seperti "tuman," dan memperkuat perdagangan dengan Eropa melalui Jalur Sutra.
 - b) Safawiyah juga memanfaatkan kontrol mereka atas produksi dan perdagangan sutra di Persia, yang menjadi salah satu ekspor utama ke Eropa dan Asia.

4. Kerajaan Islam di India

Kerajaan-kerajaan Islam di India, seperti Kesultanan Delhi (1206–1526 M) dan Kerajaan Mughal (1526–1857 M), memainkan peran penting dalam pengembangan kebijakan moneter di subbenua India.

- Kesultanan Delhi:
 - a) Pada masa Kesultanan Delhi, penguasa mulai mencetak koin dengan standar Islam seperti dinar dan dirham, tetapi dengan pengaruh lokal dari India. Sultan Alauddin Khalji (1296–1316 M) memperkenalkan

¹⁶ Bosworth, C.E. *The New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Handbook*. Edinburgh University Press, 1996, hlm. 120-125.

reformasi ekonomi penting dengan mengendalikan harga barang-barang pokok dan mengatur pasar untuk menghindari inflasi.

- b) Khalji juga memperkenalkan pajak tanah yang ketat dan mendistribusikan pendapatan untuk mendukung militer dan pembangunan infrastruktur.
- Kerajaan Mughal:
 - a) Di bawah Dinasti Mughal, terutama pada masa pemerintahan Akbar (1556–1605 M), sistem moneter India mengalami perubahan besar. Akbar memperkenalkan mata uang perak yang dikenal sebagai "rupiya," yang menjadi standar di seluruh subbenua India. Koin ini menjadi mata uang yang stabil dan dipercaya baik di dalam negeri maupun internasional.
 - b) Mughal juga mendorong perdagangan internasional melalui pelabuhan-pelabuhan besar seperti Surat, yang menjadi pusat perdagangan dengan Eropa, terutama untuk tekstil, rempah-rempah, dan barang-barang berharga lainnya.
- Sistem Pajak Akbar:

Akbar mengembangkan sistem perpajakan yang lebih terorganisir, dikenal sebagai "zabt." Ini adalah sistem pengukuran tanah yang adil untuk menetapkan pajak tanah, yang mendukung stabilitas ekonomi dan pemerintahan yang lebih efektif.

Secara umum, kebijakan moneter pada masa kerajaan-kerajaan kecil di dunia Islam dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal, tetapi tetap berlandaskan prinsip-prinsip moneter Islam yang telah ditetapkan oleh Abbasiyah dan Umawiyah. Kebijakan tersebut mencakup:

1. Pencetakan mata uang yang stabil: Sebagian besar kerajaan ini mencetak dinar emas dan dirham perak dengan standar tinggi untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dan mendukung perdagangan internasional.
2. Sistem perpajakan yang terdesentralisasi: Di banyak kerajaan, pengelolaan pajak disesuaikan dengan kondisi lokal, dengan fokus pada pajak tanah (kharaj) dan pajak kepala (jizyah), serta pengenaan pajak pada sektor perdagangan dan pertanian.
3. Perdagangan internasional: Banyak kerajaan ini mengontrol jalur perdagangan utama yang menghubungkan Timur dengan Barat, yang membantu meningkatkan pendapatan negara dan mendukung kemakmuran ekonomi.

Perbedaan kebijakan antara setiap kerajaan mencerminkan kemampuan mereka dalam menyesuaikan sistem moneter dan keuangan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan politik dan militer yang mereka hadapi.

V Kebijakan Moneter pada Masa Turki Utsmani (1299–1923 M)

Kekaisaran Turki Utsmani (Ottoman Empire) adalah salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah Islam dan dunia. Selama lebih dari enam abad, Turki Utsmani mengembangkan kebijakan ekonomi dan moneter yang memainkan peran penting dalam menopang kekuatan politik dan militernya, serta memperkuat posisi Kekaisaran sebagai pusat perdagangan internasional. Kebijakan moneter ini terus berkembang dari periode awal Kekaisaran hingga keruntuhannya pada awal abad ke-20, seiring dengan perubahan global dan dinamika internal.¹⁷

1. Pencetakan Mata Uang Utsmani

i. Mata Uang Awal (Akçe):

- a) Pada awal berdirinya, Kekaisaran Utsmani mencetak mata uang perak yang disebut **akçe**. Koin ini mulai beredar pada abad ke-14 selama masa pemerintahan Orhan (1326–1362 M), penguasa Utsmani kedua. Akçe merupakan mata uang utama yang digunakan di seluruh kekaisaran, terutama dalam transaksi domestik dan perdagangan regional.
- b) Akçe adalah koin kecil dari perak murni dan pada masa kejayaannya, memiliki nilai yang stabil. Namun, nilai akçe mulai menurun secara bertahap pada abad ke-16 karena inflasi dan penurunan kadar perak dalam koin, yang dipengaruhi oleh masuknya logam mulia dari Amerika ke Eropa dan meningkatnya harga barang.

ii. Pengembangan Mata Uang Baru (Sikke dan Kuruş):

- a) Pada abad ke-17, untuk mengatasi penurunan nilai akçe, Kekaisaran Utsmani memperkenalkan mata uang baru yang disebut **kuruş** (kurush), koin perak yang lebih besar, sebagai upaya untuk memperbaiki stabilitas ekonomi. Selain itu, **sikke**, yang merupakan koin emas, mulai digunakan secara lebih luas untuk transaksi perdagangan internasional.
- b) Pada awal abad ke-19, Utsmani memperkenalkan **lira Utsmani**, yang menjadi standar moneter baru menggantikan kuruş sebagai mata uang utama Kekaisaran. Lira Utsmani adalah koin emas yang dicetak dengan kadar tinggi, mirip dengan standar mata uang emas Eropa pada saat itu.

2. Sistem Pajak dan Kebijakan Fiskal

• Sistem Pajak Terpusat:

- a) Kekaisaran Utsmani mengadopsi sistem pajak yang sangat terorganisir, yang sebagian besar diambil dari sistem pajak Abbasiyah. Pajak tanah (**kharaj**) dan pajak untuk non-Muslim (**jizyah**) tetap menjadi sumber pendapatan utama negara. Pajak tanah diberlakukan pada semua pemilik tanah, baik Muslim maupun non-Muslim, sementara jizyah dibayarkan oleh penduduk non-Muslim sebagai pengganti kewajiban militer.
- b) Selain itu, Kekaisaran Utsmani memperkenalkan sistem **tumâr**, di mana tanah diberikan kepada para tentara sipahi (kavaleri) sebagai imbalan

¹⁷ Findley, Carter Vaughn. *The Turks in World History*. Oxford University Press, 2005, hlm. 105-110.

untuk pelayanan militer. Para sipahi ini bertugas mengumpulkan pajak dari tanah yang mereka kelola dan menyetorkannya kepada pemerintah pusat.

- **Sistem Pajak Pertanian dan Bea Cukai:**

- a) Sektor pertanian merupakan pilar ekonomi Utsmani, dan pajak pertanian memainkan peran penting dalam keuangan negara. Selain itu, pajak atas perdagangan, terutama di kota-kota besar dan pelabuhan, sangat penting bagi Utsmani, yang mengontrol jalur perdagangan strategis antara Asia dan Eropa.
- b) Pajak **bea cukai** diterapkan pada barang-barang yang diimpor dan diekspor melalui jalur perdagangan Utsmani, seperti tekstil, rempah-rempah, dan barang-barang mewah lainnya. Pelabuhan-pelabuhan seperti Istanbul, Alexandria, dan Izmir menjadi pusat penting untuk perdagangan internasional, dan kekayaan dari perdagangan ini mendukung stabilitas keuangan negara.

3. Perdagangan Internasional dan Peran Ekonomi Global

- i. **Kontrol atas Jalur Perdagangan:**

- a) Kekaisaran Utsmani berada di lokasi strategis yang menghubungkan Timur dengan Barat, mengendalikan jalur perdagangan penting yang menghubungkan Eropa dengan Timur Tengah, India, dan Asia Tenggara. Mereka memanfaatkan posisi geografis ini dengan mengontrol rute perdagangan darat dan laut, serta menerapkan pajak bea cukai yang tinggi untuk barang-barang yang melintasi wilayah kekaisaran.
- b) Istanbul, ibu kota Utsmani, menjadi pusat ekonomi global pada abad ke-15 dan ke-16, setelah Utsmani menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Hal ini memperkuat peran ekonomi mereka dalam perdagangan antara Eropa dan Asia, terutama di jalur sutra dan perdagangan rempah-rempah.

- ii. **Perdagangan dengan Eropa:**

- Utsmani mengembangkan hubungan perdagangan yang kuat dengan negara-negara Eropa, seperti Italia, Prancis, dan Inggris. Selain perdagangan produk-produk lokal seperti sutra, kapas, gandum, dan barang-barang kerajinan tangan, mereka juga menjadi perantara dalam perdagangan rempah-rempah dan barang-barang mewah dari Asia. Namun, pada abad ke-18 dan ke-19, kekuatan ekonomi Utsmani mulai melemah akibat meningkatnya pengaruh kekuatan Eropa di Laut Mediterania dan berkembangnya jalur perdagangan laut baru yang mengurangi ketergantungan pada rute darat melalui wilayah Utsmani.

4. Inflasi dan Depresiasi Mata Uang

- **Inflasi Akibat Perang dan Pengaruh Eropa:**

- a) Mulai akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17, Kekaisaran Utsmani mengalami tekanan inflasi yang meningkat. Masuknya perak dari tambang Amerika Latin ke Eropa menciptakan kelebihan pasokan logam mulia, yang berdampak pada ekonomi global termasuk Utsmani. Hal ini menyebabkan penurunan nilai akçe, mata uang perak utama Utsmani saat itu.
- b) Selain itu, perang yang terus-menerus dengan Eropa, Persia, dan pemberontakan internal memperburuk keadaan keuangan Kekaisaran, memaksa pemerintah untuk mencetak lebih banyak uang untuk membiayai kampanye militer. Peningkatan jumlah koin yang beredar menyebabkan inflasi dan depresiasi nilai mata uang.

- **Upaya Reformasi Moneter:**

Selama abad ke-18 dan ke-19, beberapa upaya reformasi moneter dilakukan untuk menstabilkan ekonomi. Salah satu reformasi besar adalah **Tanzimat** (1839–1876 M), yang memperkenalkan berbagai reformasi dalam sistem keuangan, perpajakan, dan perbankan. Selama periode ini, pemerintah Utsmani mulai memperkenalkan **mata uang kertas** sebagai bagian dari upaya modernisasi ekonomi, meskipun penerimaan terhadap mata uang kertas ini tidak merata dan sering kali diiringi dengan ketidakpercayaan dari masyarakat.

- **Utang Luar Negeri dan Kebangkrutan:**

- a) Pada akhir abad ke-19, Kekaisaran Utsmani menghadapi krisis keuangan yang parah akibat utang luar negeri yang besar. Pemerintah Utsmani terpaksa meminjam dari negara-negara Eropa untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan modernisasi militer, yang menyebabkan ketergantungan finansial pada kekuatan asing.
- b) Pada tahun 1875, Utsmani menyatakan diri bangkrut dan gagal membayar utangnya, yang menyebabkan terbentuknya **Public Debt Administration** di bawah pengawasan negara-negara Eropa. Badan ini mengambil alih pengelolaan sebagian besar pendapatan kekaisaran dari pajak dan bea cukai untuk memastikan pembayaran utang, yang semakin melemahkan kedaulatan ekonomi Utsmani.

5. Perbankan dan Lembaga Keuangan Modern

- **Lembaga Perbankan Awal:**

- a) Pada abad ke-19, Kekaisaran Utsmani mulai mengembangkan sistem perbankan modern, sebagian besar didorong oleh tekanan Eropa untuk memodernisasi ekonomi Utsmani dan mengelola utang luar negeri. Bank pertama yang didirikan di Utsmani adalah **Bank Ottoman** pada tahun 1856, yang awalnya didirikan dengan modal dari Inggris dan Prancis.

Bank ini berperan penting dalam penerbitan mata uang kertas dan pengelolaan utang negara.

- **Reformasi Finansial dalam Tanzimat:**

Reformasi Tanzimat juga memperkenalkan sistem perpajakan yang lebih terpusat dan efisien, menggantikan sistem feodal yang korup di mana pajak dikumpulkan oleh orang-orang kaya atau tuan tanah. Sistem baru ini memperkuat keuangan negara, tetapi pada saat yang sama, utang luar negeri dan pengaruh asing mengurangi kontrol pemerintah Utsmani atas ekonominya sendiri.

Kebijakan moneter Utsmani mengalami berbagai fase, mulai dari stabilitas awal hingga inflasi dan keruntuhan ekonomi pada abad ke-19. Beberapa poin utama dari kebijakan moneter Utsmani meliputi:

1. **Pencetakan mata uang perak (akçe) dan emas (sikke)**, yang mendukung perdagangan domestik dan internasional, namun mengalami depresiasi seiring waktu.
2. **Sistem perpajakan yang terpusat dan terorganisir**, yang membantu menopang ekonomi pertanian dan perdagangan.
3. **Peran strategis Utsmani dalam perdagangan internasional** melalui jalur darat dan laut, menjadikan mereka kekuatan ekonomi global.
4. **Inflasi dan penurunan nilai mata uang** akibat tekanan dari perang dan masuknya logam mulia dari luar negeri.
5. **Upaya reformasi moneter dan keuangan**, yang sebagian besar dilakukan pada abad ke-19, namun tidak cukup untuk mencegah penurunan ekonomi Utsmani di bawah tekanan utang luar negeri.

Meskipun Kekaisaran Utsmani berusaha mempertahankan stabilitas ekonominya, berbagai faktor eksternal dan internal, termasuk perang yang tak berkesudahan dan pengaruh kekuatan asing, akhirnya melemahkan fondasi keuangan negara, yang berujung pada keruntuhan di awal abad ke-20.

SIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan moneter dalam sejarah peradaban Islam memainkan peran penting dalam membentuk perkembangan ekonomi, sosial, dan politik berbagai dinasti dan kerajaan Islam. Dari masa Umawiyah hingga runtuhnya Kekaisaran Utsmani, kebijakan ini mengalami transformasi yang signifikan, dipengaruhi oleh faktor internal seperti struktur pemerintahan, kebutuhan militer, dan perdagangan internasional, serta faktor eksternal seperti invasi, perang, dan interaksi dengan kekuatan global.

1. **Masa Umawiyah (661–750 M) الأموي العصر (661–750 م)** menunjukkan kebijakan moneter yang kuat dan terstruktur, dengan pencetakan dinar emas sebagai mata uang standar. Kekuasaan Umawiyah berhasil menciptakan stabilitas ekonomi dengan memperkenalkan mata uang terpusat yang membantu memperkuat perdagangan internasional dan ekspansi wilayah. Namun, masalah ketimpangan

sosial dan perpajakan menyebabkan ketidakstabilan politik, yang berujung pada jatuhnya dinasti ini.

2. **Dinasti Abbasiyah (750–1258 M)**, العباسية الأسرة (750-1258 م) sebagai penerus Umawiyah, memperkenalkan inovasi dalam kebijakan moneter dan keuangan, termasuk pengelolaan perpajakan yang lebih terorganisir dan pencetakan mata uang yang stabil. Selama masa kejayaannya, Baghdad menjadi pusat ekonomi global, didukung oleh jalur perdagangan yang menghubungkan Timur dengan Barat. Namun, pengaruh inflasi dan fragmentasi politik, terutama akibat desentralisasi kekuasaan ke provinsi-provinsi yang memberontak, melemahkan kontrol keuangan pusat.
3. **Perbandingan antara Abbasiyah dan Umawiyah di Spanyol** menunjukkan bahwa Umawiyah di Andalusia mempertahankan sistem moneter yang stabil, namun lebih independen dari pengaruh Abbasiyah, dengan fokus pada perdagangan dan stabilitas mata uang emas. Kebijakan moneter di wilayah ini memungkinkan Andalusia menjadi pusat pengetahuan, ekonomi, dan budaya yang berkembang pesat.
4. **Kerajaan-kerajaan kecil** seperti Fatimiyah, Mamluk, dan kerajaan di Persia serta India menunjukkan fleksibilitas dalam kebijakan moneter mereka, di mana setiap kerajaan mencetak mata uang dan menetapkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pengendalian jalur perdagangan strategis dan inovasi dalam pencetakan mata uang membantu menopang stabilitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara.
5. **Kekaisaran Turki Utsmani (1299–1923 M)** mengalami perubahan besar dalam kebijakan moneter seiring dengan pertumbuhan kekaisaran. Pada awalnya, Utsmani memperkenalkan mata uang perak (akçe) dan emas (sikke) yang mendukung perdagangan internasional. Namun, inflasi dan masuknya logam mulia dari Eropa menyebabkan depresiasi nilai mata uang. Upaya reformasi melalui Tanzimat dan pembentukan sistem perbankan modern memberikan beberapa kemajuan, tetapi pada akhirnya, utang luar negeri yang besar dan pengaruh negara-negara Eropa menyebabkan kehancuran ekonomi dan akhirnya runtuhnya Kekaisaran Utsmani.

Transformasi kebijakan moneter dalam sejarah peradaban Islam mencerminkan dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan setiap dinasti atau kerajaan dalam mengelola mata uang, sistem perpajakan, dan perdagangan. Kebijakan moneter yang stabil dan terorganisir cenderung mendukung pertumbuhan ekonomi dan kekuatan politik, sedangkan inflasi, fragmentasi politik, dan ketergantungan pada utang luar negeri sering kali menjadi penyebab utama melemahnya fondasi ekonomi, yang berkontribusi pada jatuhnya berbagai dinasti dan kerajaan.

Dengan demikian, kebijakan moneter dalam sejarah Islam tidak hanya mencerminkan aspek ekonomi semata, tetapi juga memperlihatkan bagaimana keputusan-keputusan keuangan dapat membentuk kekuatan dan kelemahan sebuah peradaban dalam konteks global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aydin, E. (2020). *Economic Policies in the Ottoman Empire*. Cambridge University Press.
- Ayalon, David. *The Mamluks in Egyptian Politics and Society*. Cambridge University Press, 1992, hlm. 98-102.
- Bosworth, C.E. *The New Islamic Dynasties: A Chronological and Genealogical Handbook*. Edinburgh University Press, 1996, hlm. 120-125.
- El-Ashker, A., & Wilson, R. (2017). *Islamic Economics: A Short History*. Brill.
- Findley, Carter Vaughn. *The Turks in World History*. Oxford University Press, 2005, hlm. 105-110.
- Janwari, Y. (2023). Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer. Cirebon: CV Aksarasatu.
- Janwari, Y., Mariana, R., & Ridwan, A. H. (2023). Exploring Contemporary Islamic Economic Thought in Indonesia. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 6(3), 375–388. doi:10.31943/afkarjournal.v6i3.748.
- Hasan, Z. (2020). Monetary Policy and the Islamic State: Lessons from Historical Islamic Institutions. *Journal of Islamic Economic Studies*, 28(1), 53-75.
- Mirakhor, A., & Krichene, N. (2017). The Theory and Practice of Islamic Monetary Economics. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10(2), 167-189.
- Ibn Khallikan, Ahmad. *The History of the Abbasid Caliphate*. Dar al-Ma'arifah, 1993, hlm. 205-210.
- Jonathan A.C. Brown, *Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy* (London: Oneworld Publications, 2014), hlm. 110-115.
- John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2013), hlm. 45-52.
- Kahf, M. (2018). The Role of Government in Islamic Economic Development. *Journal of Islamic Economics*, 24(1), 12-27.
- Kennedy, Hugh. *Muslim Spain and Portugal: A Political History of Al-Andalus*. London: Routledge, 2014.
- Ismail, A. G. (2019). Central Banking and Monetary Policy in Islamic Finance. *Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance*, 15(4), 21-34.
- Rifa'at Ali Abou-El-Haj, *Formation of the Modern State: The Ottoman Empire, Sixteenth to Eighteenth Centuries* (Albany: SUNY Press, 2005), hlm. 144-150.
- Udovitch, A.L. "Banking in the Medieval Islamic World." *The Journal of the Economic and Social History of the Orient*. Vol. 16, No. 2 (1973): hlm. 155-164.

Blog Otoritatif

Historia.id. (n.d.). Para Pemikir Ekonomi Syariah di Indonesia. Diakses dari <https://historia.id/ekonomi/articles/para-pemikir-ekonomi-syariah-di-Indonesia>.

IDX Channel. (n.d.). Lima Tokoh Ekonomi Syariah Berpengaruh di Indonesia. Diakses dari <https://www.idxchannel.com/inspirator/mengenal-lima-tokoh-ekonomi-syariah-berpengaruh-di-indonesia>.

